

**PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2013**

T E N T A N G

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014**

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan anggaran pemerintah daerah secara efisien, efektif dan tepat sasaran, maka dipandang perlu melakukan pengaturan kembali perjalanan dinas jabatan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Jayapura maka pimpinan dan anggota DPRD Kota Jayapura berhak melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan Kedudukan Protokoler dan Keuangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jayapura;
 - c. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jayapura tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 249);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi pejabat/ Pegawai dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAYAPURA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Anggota DPRD Kota Jayapura.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
5. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Distrik.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Jayapura.
10. Pejabat Berwenang memerintah perjalanan dinas adalah Walikota, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Distrik dan Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama baik dalam daerah kota, dalam Provinsi Papua maupun luar Provinsi Papua, yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memerintah, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat kedudukan.
12. Sistem Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
13. Sistem *ad cost* atau biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
14. Surat Perintah Perjalan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
15. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
16. Tempat kedudukan adalah tempat dimana Instansi atau unit kerja berada.
17. Tempat bertolak adalah tempat atau kota tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.

18. Tempat tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasannya secara berjenjang dalam organisasinya.
- (2) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan di luar dari tugas kedinasan dan atau tidak terkait dengan kepentingan kedinasan, pembiayaannya tidak dibebankan pada anggaran negara atau daerah, dan menjadi beban pribadi atau organisasi yang menugaskan untuk melakukan perjalanan bersangkutan.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Papua; dan
 - c. perjalanan dinas dalam daerah Kota.

Pasal 5

Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dinas di luar wilayah Indonesia, mulai dari kota keberangkatan ke kota tujuan di luar negeri dan mulai dari kota kedatangan dari luar negeri ke kota semula.

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas dilakukan secara perorangan dan atau secara tim/ rombongan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PENGGOLONGAN DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dapat digolongkan menurut tingkatan jabatan, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggolongan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 6 (enam) tingkat yaitu :
 - a. tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah;
 - c. tingkat C untuk Kepala SKPD atau Pejabat Eselon II.B;
 - d. tingkat D untuk Golongan IV;
 - e. tingkat E untuk Golongan III;
 - f. tingkat F untuk PNS Golongan II; dan
 - g. tingkat G untuk PNS Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap.

BAB III PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pimpinan SKPD dan Kepala Kelurahan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalan Dinas (SPPD) kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas jabatan.
- (3) Dalam penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPPD harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
 - a. Walikota untuk perjalanan dinas bagi Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah serta pejabat daerah lain sesuai dengan kewenangannya;

- b. Sekretaris Dewan atas nama Ketua DPRD untuk perjalanan dinas bagi Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungannya;
- c. Sekretaris Daerah atas nama Walikota untuk perjalanan dinas bagi pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura; dan
- d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Walikota untuk perjalanan dinas bagi pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang ada di lingkungan organisasinya maupun diluar organisasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas dilingkungan instansi yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD di tandatangani oleh :
 - a. atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; dan
 - b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan dan atau setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah Walikota dan Ketua DPRD Kota Jayapura;

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS

Paragraf Pertama
Alokasi dan Sumber biaya

Pasal 11

- (1) Seluruh biaya perjalanan dinas harus dialokasikan dalam dokumen anggaran SKPD dan Unit Kerja masing-masing.
- (2) Ketersediaan alokasi biaya perjalanan dinas harus mempertimbangkan kemampuan plafon anggaran SKPD dan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Alokasi biaya perjalanan dinas harus mengedepankan prinsip efisien dan efektif, sehingga perlu menghitung secara cermat dan teliti atas frekuensi atau volume perjalanan dinas dan jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas dalam satu tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Sumber biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing.
- (2) Biaya perjalanan dinas dapat dibebankan kepada Sekretariat Daerah atau SKPD yang lain atau Unit kerja yang lain, apabila ditentukan lain sesuai kebutuhan perjalanan dinas bersangkutan.

Paragraf Kedua
Komponen biaya perjalanan dinas

Pasal 13

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. biaya representasi.

- (2) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua meliputi :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi laut, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan / stasiun dan sebaliknya;
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya; dan
 - d. biaya representasi.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas atas biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Khusus biaya perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Papua yang tidak menggunakan transportasi udara, transportasi laut dan transportasi kereta api, tetapi menggunakan transportasi darat diberikan uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Dalam Daerah di wilayah Kota Jayapura meliputi:
 - a. perjalanan dinas di dalam daerah yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transport lokal; dan
 - b. perjalanan dinas di dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian yang meliputi uang saku, uang transport lokal dan uang penginapan;
- (2) Dalam hal kurang atau lebih dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari lamanya waktu jarak yang ditempuh dan atau lamanya mengikuti kegiatan dalam perjalanan dinas bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada pasal 5 terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal;
 - b. biaya transportasi pegawai yang meliputi uang transportasi udara, uang transportasi kereta api, airport tax serta transportasi darat dari rumah ke bandara / pelabuhan dan sebaliknya; dan
 - c. biaya penginapan yang meliputi hotel, losmen, wisma dan sejenisnya.
- (2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai di tempat tujuan di luar negeri.
- (3) Besaran komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dengan menggunakan perhitungan standar kurs mata uang Dolar Amerika Serikat (US \$).

Pasal 16

Biaya perjalanan dinas pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap diberikan untuk selama-lamanya 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

Pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditentukan dalam SPPD karena diperintahkan mengikuti kegiatan lain, mendapatkan tambahan biaya perjalanan dinas selama mengikuti kegiatan dimaksud sebagai berikut :

- a. pada kota yang sama, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi selama mengikuti kegiatan lain dimaksud; dan
- b. pada kota yang lain, maka dapat diberikan tambahan biaya perjalanan berupa uang harian, uang penginapan, uang representasi dan uang transportasi udara atau laut atau kereta api.

Pasal 18

Rincian besaran dana komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 tersebut terdapat dalam lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf Ketiga Sistem dan prosedur pembayaran

Pasal 19

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan *sistem lumpsum* dan pembayaran dengan *sistem ad cost*.
- (2) Pembayaran dengan sistem *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang harian, uang penginapan dan uang representasi dan diterima langsung oleh pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Pembayaran dengan sistem *ad cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komponen uang transportasi udara, transportasi laut, transportasi kereta api, airport tax, transport darat dari dan atau ke Bandara/pelabuhan/stasiun, yang dilakukan dengan cara :
 - a. komponen uang transportasi udara dan transportasi laut dibayarkan/ dibeli langsung oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Unit Kerja pada Agen atau Travel penjualan tiket;
 - b. khusus uang transportasi kereta api disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada waktu melakukan perjalanan dinas; dan

- c. komponen uang airport tax dan uang transport menuju ke dan atau dari bandara/pelabuhan/stasiun kereta api diberikan langsung kepada pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang akan melakukan perjalanan dinas.

Pasal 20

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui cara pembayaran sekaligus seluruh biaya perjalanan dinas dan atau pembayaran secara bertahap minimal 70% dari total biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan dengan ketersediaan dana kas SKPD pada saat keberangkatan melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal pembayaran sisa dana biaya perjalanan dinas sebesar 30 % dilakukan pada saat sedang melaksanakan perjalanan dinas ataupun setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas sesuai ketersediaan dana, dan dibayarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran bagi komponen pembiayaan yang menggunakan sistem *ad cost*.

Pasal 21

- (1) Adanya kelebihan biaya perjalanan dinas akibat terjadi selisih uang transportasi atau tiket, selisih antara lamanya perjalanan berdasarkan SPPD dengan bukti tiket keberangkatan dan tiket pulang, maka atas kelebihan tersebut wajib disetor kembali kepada Bendahara SKPD/Unit Kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak tiba kembali di Jayapura.
- (2) Kelebihan biaya perjalanan akibat selisih antara lamanya perjalanan sesuai SPPD dengan bukti tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang harian, uang penginapan dan uang representasi.
- (3) Kelalaian yang menimbulkan kerugian negara/daerah atas ketentuan ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab pejabat atau pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS LAIN

Pasal 22

Selain perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, juga termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal :

- a. ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dinas di luar tempat kedudukan;
- b. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan tertentu;

- c. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau surat keterangan dokter bagi pejabat Negara/pejabat daerah/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap yang cedera atau sakit pada waktu dan atau karena melaksanakan tugas kedinasan; dan
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah bagi pejabat Negara/pejabat daerah/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap yang meninggal dunia karena dan atau dalam melakukan perjalanan dinas serta dalam atau karena menjalankan tugas kedinasan.

Pasal 23

- (1) Keperluan perjalanan dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pendidikan dan pelatihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.
- (2) Keperluan perjalanan dalam rangka pengobatan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, selain diberikan biaya perjalanan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 11, juga diberikan biaya pengobatan dan perawatan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Keperluan perjalanan dalam rangka menjemput / mengantar jenazah dapat diberikan untuk 2 (dua) orang anggota keluarga, yang besarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 11, serta diberikan biaya tambahan berupa pemetian, biaya angkutan dan penjemputan jenazah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menurut format sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD atau unit kerja lainnya.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 25

- (1) Pejabat Negara, pejabat daerah, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen perjalanan dinas tersebut kepada pejabat yang memerintah dan atau pejabat pengguna anggaran untuk kepentingan pertanggungjawaban.
- (2) Dokumen perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari SPT, SPPD, biaya transportasi (tiket pesawat atau kapal laut atau angkutan darat), boarding pas, airport tax dan bukti/kuitansi angkutan darat dari rumah/penginapan ke bandara dan atau sebaliknya.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan strategis, serta melakukan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (2) Pejabat yang berwenang dan pejabat atau pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian negara/daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Dalam hal kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat yang berwenang memerintah perjalanan dinas bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini di lingkungan organisasinya.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 27

Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 28

Ketentuan perjalanan dinas dalam Keputusan Walikota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri dan Luar Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Jayapura Nomor 12 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 September 2013**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 27 September 2013**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

**R.D. SIAHAYA, SH,MM
PEMBINA TK I
NIP. 19611112 198603 1 024**

BERITA DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 82

Untuk Salinan Yang sah sesuai dengan Aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA
NIP. 19720703 200112 1 004**

**STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM PNSD/NON PNSD
 DALAM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

A. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1 UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN

(PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM LUMPSUM)

| NO | URAIAN JENIS PERJALANAN DINAS | TINGKAT PERJALANAN DINAS | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G |
| | | Walikota/ Wakil Walikota, Pimpinan DPRD | Anggota DPRD, Sekretaris Daerah | Kepala SKPD/ Pejabat Eselon II.b | Gol IV | Gol III | Gol II | Gol I & PTT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | LUAR DAERAH PROVINSI PAPUA | 3.030.000 | 2.630.000 | 2.230.000 | 1.825.000 | 1.600.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| a | Uang Harian: | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.125.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 |
| | - Uang saku | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| | - Uang makan | 400.000 | 400.000 | 300.000 | 275.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - Transport lokal | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 |
| b | Biaya Penginapan Harian | 1.200.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 300.000 |
| c | Biaya Representase | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | | | |
| 2 | LUAR DAERAH DALAM PROVINSI PAPUA | 2.730.000 | 2.530.000 | 2.180.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 750.000 |
| a | Uang Harian: | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 | 550.000 |
| | - Uang saku | 500.000 | 400.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 200.000 | 150.000 |
| | - Uang makan | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| | - Transport lokal | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 350.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| b | Biaya Penginapan Harian | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 |
| c | Biaya Representase DPRD | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | | | |
| 3 | DALAM DAERAH KOTA | | | | | | | |
| a | Kurang dari 8 jam: | | | | | | | |
| | - Transport lokal | 500.000 | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 120.000 |
| b | Lebih dari 8 jam: | | | | | | | |
| | Uang Harian | 1.100.000 | 1.075.000 | 800.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 | 475.000 |
| | - Uang saku | 300.000 | 275.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 100.000 | 75.000 |
| | - Transport lokal | 300.000 | 300.000 | 200.000 | 175.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - Biaya penginapan | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

WALIKOTA JAYAPURA,

BENHUR TOMI MANO

2 BIAYA TRANSPORT/ TIKET

(PERTANGGUNGJAWABAN DENGAN SISTEM AT COST)

| NO | JENIS TRANSPORTASI | TINGKAT PERJALANAN DINAS | | | KETERANGAN |
|----|--------------------|--|--|----------------------------------|---------------------|
| | | TINGKAT A | TINGKAT B, C | TINGKAT D, E, F, G | |
| | | Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD | Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD/ Pejabat Eselon II.b | Golongan IV, III, II, I & PTT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PESAWAT UDARA | BISNIS | EKONOMI | EKONOMI | SESUAI KENYATAAN |
| 2 | KAPAL LAUT | KELAS I | KELAS II | KELAS III & EKONOMI | |
| 3 | KERETA API | VIP | VIP | EKONOMI | |

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720703 200112 1 004

**STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM PNSD/NON PNSD
 DALAM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

B. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

| NO | NEGARA | TINGKAT PERJALANAN DINAS | | | |
|----|------------------------|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD | Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah | Kepala SKPD | Golongan IV, III, II, I & PTT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | AMERIKA UTARA | | | | |
| 1 | Amerika Serikat | 527 | 473 | 417 | 343 |
| 2 | Kanada | 447 | 404 | 368 | 307 |
| | AMERIKA SELATAN | | | | |
| 3 | Argentina | 395 | 277 | 242 | 241 |
| 4 | Venezuela | 464 | 323 | 287 | 286 |
| 5 | Brazil | 436 | 341 | 291 | 241 |
| 6 | Chile | 415 | 316 | 270 | 222 |
| 7 | Columbia | 386 | 281 | 240 | 221 |
| 8 | Peru | 383 | 277 | 237 | 221 |
| 9 | Suriname | 398 | 295 | 252 | 207 |
| 10 | Ekuador | - | 273 | 242 | 241 |
| | AMERIKA TENGAH | | | | |
| 11 | Mexico | 429 | 318 | 282 | 281 |
| 12 | Kuba | 466 | 419 | 282 | 281 |
| 13 | Panama | 414 | 307 | 272 | 271 |
| | EROPA BARAT | | | | |
| 14 | Austria | 504 | 453 | 318 | 317 |
| 15 | Belgia | 466 | 419 | 282 | 281 |
| 16 | Perancis | 512 | 464 | 382 | 381 |
| 17 | Rep. Federasi Jerman | 443 | 411 | 282 | 281 |
| 18 | Belanda | 463 | 416 | 272 | 271 |
| 19 | Swiss | 509 | 456 | 322 | 321 |
| | EROPA UTARA | | | | |
| 20 | Denmark | 472 | 427 | 275 | 241 |
| 21 | Finlandia | 453 | 409 | 354 | 313 |
| 22 | Norwegia | 517 | 465 | 288 | 286 |
| 23 | Swedia | 466 | 436 | 342 | 341 |
| 24 | Kerajaan Inggris | 587 | 534 | 432 | 431 |
| | EROPA SELATAN | | | | |
| 25 | Bosnia Herzegovina | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26 | Kroasia | 483 | 444 | 353 | 352 |
| 27 | Spanyol | 457 | 413 | 287 | 286 |
| 28 | Yunani | 422 | 379 | 242 | 241 |
| 29 | Italia | 520 | 472 | 372 | 371 |
| 30 | Portugal | 425 | 382 | 242 | 241 |
| 31 | Serbia | 401 | 361 | 313 | 277 |
| | EROPA TIMUR | | | | |
| 32 | Bulgaria | 406 | 367 | 320 | 284 |
| 33 | Czech | 426 | 390 | 331 | 293 |
| 34 | Hongaria | 421 | 381 | 339 | 300 |
| 35 | Polandia | 401 | 361 | 313 | 277 |
| 36 | Rumania | 416 | 381 | 313 | 277 |
| 37 | Rusia | 556 | 512 | 407 | 406 |
| 38 | Slovakia | 429 | 387 | 335 | 297 |
| 39 | Ukraina | 425 | 382 | 328 | 290 |
| | AFRIKA BARAT | | | | |
| 40 | Negeria | 361 | 313 | 292 | 291 |
| 41 | Senegal | 334 | 276 | 206 | 201 |
| | AFRIKA TIMUR | | | | |
| | Ethiopia | 312 | 257 | 192 | 167 |
| 42 | Kenya | 334 | 276 | 206 | 196 |
| 43 | Madagaskar | 296 | 244 | 216 | 215 |
| 44 | Tanzania | 330 | 272 | 203 | 182 |
| 45 | Zimbabwe | 285 | 244 | 216 | 215 |
| 46 | Mozambique | 319 | 263 | 212 | 211 |
| | AFRIKA SELATAN | | | | |
| 47 | Namibia | 300 | 247 | 185 | 161 |
| 48 | Afrika Selatan | 304 | 251 | 202 | 201 |
| | AFRIKA UTARA | | | | |
| 49 | Aljazair | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 50 | Mesir | 368 | 273 | 212 | 190 |
| 51 | Maroko | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 52 | Tunisia | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 53 | Sudan | 342 | 282 | 210 | 184 |
| 54 | Libya | 308 | 254 | 189 | 165 |

**STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS DAN HONORARIUM PNSD/NON PNSD
 DALAM KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**

B. STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

| NO | NEGARA | TINGKAT PERJALANAN DINAS | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| | | Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD | Anggota DPRD/ Sekretaris Daerah | Kepala SKPD | Golongan IV, III, II, I & PTT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ASIA BARAT | | | | |
| 55 | Azerbaijan | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 56 | Bahrain | 405 | 286 | 222 | 208 |
| 57 | Irak | 397 | 283 | 220 | 201 |
| 58 | Yordania | 365 | 254 | 197 | 196 |
| 59 | Kuwait | 406 | 283 | 257 | 256 |
| 60 | Libanon | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 61 | Qatar | 386 | 276 | 215 | 196 |
| 62 | Arab Suriah | 358 | 257 | 200 | 196 |
| 63 | Turki | 365 | 270 | 210 | 188 |
| 64 | Persatuan Arab Emirat | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 65 | Yaman | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 66 | Saudi Arabia | 391 | 276 | 215 | 201 |
| 67 | Kesultanan Oman | 359 | 254 | 197 | 185 |
| | ASIA TIMUR | | | | |
| 68 | Republik Rakyat Cina | 378 | 238 | 207 | 206 |
| 69 | Hongkong | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 70 | Jepang | 519 | 303 | 262 | 261 |
| 71 | Korea Selatan | 421 | 326 | 298 | 296 |
| 72 | Korea Utara | 395 | 238 | 207 | 206 |
| | ASIA SELATAN | | | | |
| 73 | Afganistan | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 74 | Bangladesh | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 75 | India | 352 | 263 | 242 | 241 |
| 76 | Pakistan | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 77 | Srilanka | 348 | 201 | 167 | 166 |
| 78 | Iran | 351 | 260 | 202 | 181 |
| | ASIA TENGAH | | | | |
| 79 | Uzbekistan | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 80 | Kazakhtan | 456 | 420 | 334 | 333 |
| | ASIA TENGGARA | | | | |
| 81 | Philipina | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 82 | Singapura | 424 | 290 | 224 | 221 |
| 83 | Malaysia | 381 | 253 | 212 | 211 |
| 84 | Thailand | 392 | 275 | 211 | 201 |
| 85 | Myanmar | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 86 | Laos | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 87 | Vietnam | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 88 | Brunei Darussalam | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 89 | Kamboja | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 90 | Timor Leste | 392 | 354 | 229 | 196 |
| | ASIA PASIFIK | | | | |
| 91 | Australia | 439 | 403 | 272 | 271 |
| 92 | Selandia Baru | 392 | 246 | 222 | 221 |
| 93 | Kaledonia | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 94 | Papua Nugini | 385 | 353 | 237 | 192 |
| 95 | Fiji | 363 | 329 | 221 | 179 |

WALIKOTA JAYAPURA,

BENHUR TOMI MANO

2. SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (PP)**

(dalam US\$)

| No. | KOTA | KELAS | | |
|------------------------|-------------------|-----------|--------|---------|
| | | Eksekutif | Bisnis | Ekonomi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| AMERIKA UTARA | | | | |
| 1 | Chicago | 12,471 | 6,749 | 3,587 |
| 2 | Houston | 12,635 | 6,487 | 3,591 |
| 3 | Los Angeles | 11,187 | 5,809 | 3,178 |
| 4 | New York | 14,761 | 6,040 | 3,753 |
| 5 | Ottawa | 12,266 | 6,924 | 4,083 |
| 6 | San Fransisco | 12,468 | 6,623 | 2,771 |
| 7 | Toronto | 11,750 | 8,564 | 3,201 |
| 8 | Vancouver | 10,000 | 7,458 | 3,277 |
| 9 | Washington | 14,428 | 8,240 | 3,743 |
| AMERIKA SELATAN | | | | |
| 10 | Bogota | 18,399 | 9,426 | 7,713 |
| 11 | Brazilia | 16,393 | 11,518 | 5,970 |
| 12 | Buenos Aires | 13,237 | 9,134 | 5,970 |
| 13 | Caracas | 17,832 | 10,399 | 5,130 |
| 14 | Paramaribo | 15,018 | 9,494 | 7,353 |
| 15 | Santiago de Chile | 21,874 | 15,539 | 8,900 |
| 16 | Quito | 17,325 | 16,269 | 12,127 |
| AMERIKA TENGAH | | | | |
| 17 | Mexico City | 11,822 | 7,831 | 3,966 |
| 18 | Havana | 14,702 | 11,223 | 7,335 |
| 19 | Panama City | 23,291 | 14,389 | 13,570 |
| EROPA BARAT | | | | |
| 20 | Vienna | 10,520 | 4,177 | 3,357 |
| 21 | Brussels | 10,713 | 5,994 | 3,870 |
| 22 | Marseilles | 10,850 | 5,074 | 3,541 |
| 23 | Paris | 10,724 | 6,085 | 3,331 |
| 24 | Berlin | 10,277 | 6,126 | 3,959 |
| 25 | Bern | 11,478 | 6,056 | 4,355 |
| 26 | Bonn | 10,945 | 5,023 | 3,753 |
| 27 | Hamburg | 7,464 | 6,031 | 3,825 |
| 28 | Geneva | 8,166 | 5,370 | 4,333 |
| 29 | Amsterdam | 8,216 | 5,898 | 3,331 |
| EROPA UTARA | | | | |
| 30 | Copenhagen | 9,696 | 4,920 | 3,730 |
| 31 | Helsinki | 10,023 | 5,931 | 3,681 |
| 32 | Stockholm | 9,917 | 5,506 | 3,433 |
| 33 | London | 10,980 | 5,446 | 4,153 |
| 34 | Olso | 9,856 | 4,773 | 4,049 |
| EROPA SELATAN | | | | |
| 35 | Sarajevo | 11,778 | 7,129 | 6,033 |
| 36 | Zagreb | 14,446 | 6,334 | 2,794 |
| 37 | Athens | 14,911 | 9,256 | 8,041 |
| 38 | Lisbon | 9,309 | 4,746 | 3,383 |
| 39 | Madrid | 10,393 | 4,767 | 3,631 |
| 40 | Rome | 8,714 | 4,774 | 3,851 |
| 41 | Beograd | 9,921 | 6,158 | 5,350 |
| EROPA TIMUR | | | | |
| 42 | Bratislava | 6,993 | 4,341 | 3,771 |
| 43 | Bucharest | 8,839 | 4,982 | 4,113 |
| 44 | Kiev | 10,860 | 6,029 | 5,193 |
| 45 | Moscow | 9,537 | 7,206 | 5,143 |
| 46 | Prague | 8,484 | 6,748 | 3,451 |
| 47 | Sofia | 7,473 | 6,346 | 3,612 |
| 48 | Warsaw | 10,777 | 5,052 | 3,447 |
| AFRIKA BARAT | | | | |
| 49 | Dakkar | 12,900 | 9,848 | 8,555 |
| 50 | Abuja | 10,281 | 7,848 | 6,818 |
| AFRIKA TIMUR | | | | |
| 51 | Addis Ababa | 7,700 | 5,808 | 5,552 |
| 52 | Nairobi | 7,966 | 6,081 | 8,732 |
| 53 | Antananarive | 11,779 | 9,000 | 8,282 |
| 54 | Dar Es Salaam | 8,947 | 6,599 | 5,733 |
| 55 | Harare | 11,118 | 10,600 | 5,747 |
| AFRIKA SELATAN | | | | |
| 56 | Windhoek | 18,241 | 11,774 | 7,510 |
| 57 | Cape Town | 14,941 | 8,438 | 7,330 |
| 58 | Johannesburg | 11,255 | 8,524 | 6,275 |
| AFRIKA UTARA | | | | |
| 59 | Algiers | 9,536 | 6,593 | 5,710 |
| 60 | Cairo | 7,820 | 6,414 | 4,037 |
| 61 | Khartoum | 5,904 | 4,507 | 3,915 |
| 62 | Rabbat | 8,910 | 7,721 | 5,665 |
| 63 | Tripoli | 6,551 | 4,975 | 5,706 |
| 64 | Tunisia | 9,419 | 4,958 | 4,175 |

| | | | | |
|-----|----------------------|--------|--------|-------|
| | | | | |
| | ASIA BARAT | | | |
| 65 | Manama | 6,400 | 5,992 | 4700 |
| 66 | Baghdad | 5,433 | 4,148 | 3,545 |
| 67 | Amman | 7,561 | 6,431 | 3,545 |
| 68 | Kuwait | 6,771 | 4,273 | 3,110 |
| 69 | Beirut | 7,703 | 4,490 | 3,730 |
| 70 | Doha | 5,216 | 3,639 | 2,745 |
| 71 | Damascus | 8,684 | 5,390 | 3,325 |
| 72 | Ankara | 9,449 | 6,643 | 3,581 |
| 73 | Abu Dhabi | 5,283 | 4,976 | 2,727 |
| 74 | Sanna | 8,205 | 5,878 | 3,679 |
| 75 | Jeddah | 6,446 | 3,785 | 3,321 |
| 76 | Muscat | 6,469 | 5,156 | 3,727 |
| 77 | Riyadh | 5,359 | 3,510 | 3,000 |
| | | | | |
| | ASIA TENGAH | | | |
| 78 | Tashkent | 13,617 | 8,453 | 7,343 |
| 79 | Astana | 13,661 | 12,089 | 8,962 |
| | | | | |
| | ASIA TIMUR | | | |
| 80 | Beijing | 2,595 | 2,140 | 1,623 |
| 81 | Hongkong | 3,028 | 2,633 | 1,257 |
| 82 | Osaka | 3,204 | 2,686 | 1,864 |
| 83 | Tokyo | 3,734 | 2,675 | 1,835 |
| 84 | Pyongyang | 2,421 | 1,999 | 1,737 |
| 85 | Seoul | 3,233 | 2,966 | 1,737 |
| | | | | |
| | ASIA SELATAN | | | |
| 86 | Kaboul | 6,307 | 3,905 | 3,208 |
| 87 | Teheran | 4,475 | 3,416 | 2,920 |
| 88 | Colombo | 3,119 | 2,562 | 1,628 |
| 89 | Dhaka | 3,063 | 2,417 | 1,092 |
| 90 | Islamabad | 5,482 | 3,333 | 2,501 |
| 91 | Karachi | 4,226 | 3,633 | 2,321 |
| 92 | New Delhi | 3,380 | 2,009 | 1,673 |
| | | | | |
| | ASIA TENGGARA | | | |
| 93 | Bandar Seri Bagawan | 1,628 | 1,147 | 919 |
| 94 | Bangkok | 2,344 | 1,155 | 823 |
| 95 | Davao City | 2,757 | 2,558 | 1,641 |
| 96 | Hanoi | 1,833 | 1,833 | 1,656 |
| 97 | Ho Chi Minh | 1,677 | 1,503 | 1,235 |
| 98 | Johor Bahru | 1,195 | 911 | 525 |
| 99 | Kota Kinabalu | 1,894 | 1,427 | 694 |
| 100 | Kuala Lumpur | 1,158 | 695 | 585 |
| 101 | Manila | 2,453 | 1,614 | 1,150 |
| 102 | Penang | 918 | 766 | 545 |
| 103 | Pnom Penh | 2,202 | 1,981 | 1,627 |
| 104 | Singapore | 991 | 673 | 403 |
| 105 | Vientiane | 2,274 | 2,025 | 1,420 |
| 106 | Yangon | 1,468 | 1,212 | 1,053 |
| | | | | |
| | ASIA PASIFIK | | | |
| 107 | Caberra | 5,506 | 4,926 | 2,500 |
| 108 | Darwin | 6,689 | 4,900 | 3,964 |
| 109 | Melbourne | 4,886 | 3,814 | 2,858 |
| 110 | Noumea | 6,940 | 5,917 | 3,780 |
| 111 | Perth | 5,771 | 1,801 | 1,525 |
| 112 | Port Moresby | 8,252 | 7,398 | 5,034 |
| 113 | Sydney | 4,629 | 4,237 | 2,557 |
| 114 | Vanimo | 3,318 | 2,740 | 2,380 |
| 115 | Wellington | 6,561 | 4,687 | 3,413 |

** Satuan biaya tiket termasuk asuransi, tidak termasuk airport tex, serta biaya retribusi lainnya.

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

Drs. BENHUR TOMI MANO, MM.

Untuk Salinan Yang Sah Sesuai Dengan Aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM

MAKZI L. ATANAY, SH.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19720703 200112 1 004